

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DENGAN DATA SDGS SEBAGAI DASAR KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Maria Ulfa¹, Wahyu Rahmat Hidayah², Arib Pradana³, Lala Amelia⁴, Wahyu Muhamad Nur⁵, Jaka Nur Hidayatullah⁶, Lidya Widianti⁷, Defi Rahmadani⁸

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8}
E-mail: ulfa3516@gmail.com

ABSTRAK

Praktikum mata kuliah ini diadakan dalam rangka memahami konsep asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan peran pemerintahan desa dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diusulkan oleh berbagai negara pada 25 September 2015 dengan tujuan akhir mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia. Praktikum merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah yang dipelajari.

Kata Kunci: *Praktikum, SDGs, Desa*

ABSTRACT

The practicum course is held in order to understand the basic concepts of village administration and the role of village government in the Sustainable Development Goals (SDGs) which are the agenda of the United Nations (UN) proposed by various countries on September 25 2015 with the ultimate goal of ending poverty, protect the planet earth and ensure prosperity for all mankind. Practicum is a learning activity that aims to give students the opportunity to test and apply theory or scientific investigation and proof of the subjects studied.

Keywords: *Practicum, SDGs, Village*

PENDAHULUAN

Sistem perkuliahan yang memiliki kurikulum dimana didalam sistem tersebut dikaji pula persoalan mengenai perkuliahan yang tidak hanya mengedepankan penyampaian materi kuliah didalam kelas namun juga adanya pendalaman materi mata kuliah dengan terjun langsung yang biasa disebut dengan praktikum sangatlah efektif dan baik bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah ini, Dengan praktek secara langsung, tentunya membuat mahasiswa akan lebih memahami materi yang sedang di pelajari dan mampu memicu mahasiswa untuk menciptakan inovasi baru yang berdasarkan

praktikum mata kuliah dengan jurusan masing-masing mahasiswa.

Praktikum mata kuliah ini diadakan dalam rangka memahami konsep asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan peran pemerintahan desa dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau dalam bahasa Indonesia adalah Tujuan Perkembangan Berkelanjutan yang merupakan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diusulkan oleh berbagai negara pada 25 September 2015 dengan tujuan akhir mengakhiri kemiskinan, melindungi planet bumi dan menjamin kemakmuran bagi seluruh umat manusia.

Praktikum merupakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian matakuliah tertentu. Praktikum dapat dilaksanakan di manapun sebagai contoh: laboratorium, kebun percobaan, rumah sakit, sekolah, dan tempat lain. Bahkan, dapat dilakukan di instansi lain. Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam matakuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dengan praktikum maka diharapkan sarjana dapat mengerti dan mengatasi semua persoalan yang terjadi dimasyarakat.

Pelaksanaan kegiatan Praktikum ini dilakukan dengan diadakannya pembekalan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan praktikumnya dan kemudian mengharuskan mahasiswa untuk memahami adanya Capaian dari tema praktikum mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa ini yaitu *"Data SDGs sebagai Dasar Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa"*

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang No.59 Tahun 2017 yang mengatur tentang pelaksanaan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Global di Indonesia, bahwa Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 juga dijelaskan bahwa untuk memaksimalkan tercapinya SDGs di Indonesia, maka disusun tiga dokumen perencanaan yaitu: 1. Peta Jalan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2. Rencana Aksi Nasional *Sustainable Development Goals* (RAN SDGs) 3. Rencana Aksi Daerah *Sustainable Development Goals* Provinsi (RAD SDGs Provinsi).

Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPPENAS

2017 bahwa SDGs adalah penyempurnaan dari Millennium Development Goals (MDGs) yang berlaku dari tahun 2000 hingga 2015. *Sustainable Development Goals* (SDGs) sendiri merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan.

Menurut Permendes No. 13 Tahun 2020 berdasarkan Perpres No. 59 Tahun 2017 maka disusunlah SDGs Desa karena SDGs Desa dinilai memiliki kontribusi yang besar dalam mencapai SDGs di Indonesia. *Sustainable Development Goals* Desa (SDGs Desa) adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomis tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Menurut PBB (dalam Morton, S., Pencheon,D.,& Squires,N., 2017) menyatakan bahwa negara-negara memiliki tanggungjawab utama untuk tindak lanjut dan peninjauan, maka dari itu dalam pelaksanaan program-program untuk mencapai SDGs akan membutuhkan pengumpulan data yang berkualitas, dapat diakses dan tepat waktu.

Ditinjau dari hal tersebut maka unsur akuntabilitas untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sangatlah penting untuk dilakukan

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data.

Dan digunakanlah data primer yang merupakan data yang didapat secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian untuk

memperoleh data primer itu dilakukan beberapa teknik pengambilan data yaitu antara lain:

Observasi Mengamati sesuatu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran. Teknik observasi dilakukan peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan maksud meng-cross check data yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data lainnya. Observasi dilakukan pada jaringan jalan, aktivitas, ruang terbuka dan bangunan yang ada pada kawasan Desa Baregbeg.

Wawancara Dialog dilakukan pewawancara (interviewer) dalam hal ini peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber secara langsung. Pada cara ini, menggunakan pola wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci, selain itu dengan wawancara tidak terpimpin dalam bentuk percakapan yang nantinya disaring sesuai dengan penelitian yang diteliti. Wawancara dilakukan pada masyarakat setempat dan pemerintah Desa Baregbeg.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui bahwa Dalam mengatur kehidupannya dalam suatu desa diatur oleh pemerintah desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diuraikan pembahasan mengenai Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan sebagai berikut:

Produktivitas

Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar pelayanan publik

itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Untuk dapat dilakukan oleh pemerintah desa perlu adanya inovasi pelayanan yang dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat.

Maka dari itu, dimensi Produktivitas dalam kinerja pemerintah Desa Baregbeg sudah sangat baik, hal ini dapat terlihat pada indikator produktivitas khususnya dengan adanya inovasi pelayanan di Pemerintah desa Baregbeg masyarakat merasakan manfaat yang didapat dari inovasi pelayanan di Desa Baregbeg.

Kualitas Layanan

Kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja dalam organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi kepuasan masyarakat. Kualitas layanan dari aspek pemberian informasi yang dilakukan pemerintah desa sudah cukup baik, ini dibuktikan dengan adanya papan pengumuman serta penyampaian informasi yang lebih intensif dilakukan kepala dusun selaku pemerintah desa, meskipun pada pelaksanaannya tidak seratus persen informasi itu dapat di tanggapinya masyarakat. Tetapi setidaknya pemerintah desa sudah terlihat dalam penyampaian informasi.

Kemudian dari aspek kepuasan masyarakat dapat dinilai cukup baik, karena sejauh penyelenggaraan pemerintahan Desa Baregbeg itu Minim komplek.

Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program - program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam hal mengenali kebutuhan masyarakat, pemerintah desa Baregbeg sangatlah baik dimana desa baregbeg memiliki "MASKARA" Mobil Aspirasi Kampung Juara yang didapat dari Pemprov Jabar kepada 11

desa berprestasi di Kabupaten Ciamis salah satunya oleh Desa Baregbeg. Pemerintah Desa dan Warga setempat dapat menggunakannya sebagai kendaraan pelayanan darurat. Antara lain antar-jemput warga yang sakit, sampai kegiatan keagamaan, jemput bola saat warga hendak membayar PBB serta berbagai kegiatan sosial dan hiburan lainnya yang ada di lingkungan desa.

Responsibilitas

Responsibilitas merupakan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi. Dalam hal ini pemerintah desa dalam segala aktivitas bekerja di Desa Baregbeg harus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan pada Pemerintahan Desa Baregbeg.

Pada aspek pemerintah desa mampu bekerja sesuai dengan peraturan dan prosedur dalam hal ini sudah sangat baik, hal ini dibuktikan dengan observasi bahwa aparatur desa tepat waktu untuk datang kerja juga pulang sesuai dengan peraturan kerja.

Akuntabilitas

Dalam konteks ini konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah seperti pencapaian target.

Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal juga seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada dimensi ini dengan dua indikatornya sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa. Dari aspek kesesuaian pemerintah desa dengan norma yang berkembang dengan masyarakat dapat dilihat pemerintah desa sudah menunjukkan sikap yang ramah dan sopan santun kepada masyarakat dan disaksikan secara langsung oleh kami

sendiri sebagai mahasiswa praktikum mata kuliah system pemerintahan desa. Berdasarkan pembahasan diatas tersebut, Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Baregbeg Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis pada umumnya sudah sangat baik.

Adapun salah satu Realisasi SDGs Di Desa Baregbeg dapat terlihat dari Implementasi salah satu Tipologi dari 8 Tipologi Desa yaitu,

Desa Tanggap Budaya

Tujuan ini menargetkan Desa damai berkeadilan, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Adapun, SDGs Desa berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh elemen lembaga-lembaga di tingkat desa.

Karena dengan keterlibatan semua elemen desa, dan berfungsinya lembaga di desa dalam kehidupan masyarakat akan menjadi penopang kehidupan kebhinnekaan di desa yang dinamis, serta pendorong tercapainya SDGs Desa. Kearifan lokal di Desa Baregbeg dapat dilihat dari adanya Kampung Dokdak yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Karena sudah lama, kampung ini mempunyai nilai sejarah dan bahkan turun-temurun dari generasi sebelumnya.

Hingga saat ini sudah ada tiga generasi, Dan kampung dokdak ini masih tetap eksis pada masa global seperti ini dengan mempertahankan ciri khasnya yaitu dengan pembuatan dan penggunaan alat tradisional sendiri, Dengan keadaan seperti ini dapat mnambah nilai lebih bagi **pandai besi** dikampung dokdak.

Upacara Nadran Pemerintah Desa Baregbeg, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis, bersama unsur masyarakat dibantu oleh penggiat budaya lokal wilayah kecamatan setempat selalu menggelar upacara adat Nadran di Situs makam Ki Buyut Mangun Tapa alias Ki Gendeng Tapa. Makam tersebut

berlokasi di Blok Dusun Baregbeg Kolot, Desa Baregbeg. Kegiatan yang dilaksanakan setiap akan menyambut Bulan Suci Ramadan dan biasa digelar oleh masyarakat desa setempat serta para penggiat budaya lokal wilayah Kecamatan Baregbeg sebagai ajang silaturahmi warga sekaligus melakukan beberesih makam para karuhun.

Dengan adanya upacara nadran ini maka terbukti bahwa kearifan lokal di Desa Baregbeg ini masih terjaga dilihat dari antusias masyarakat yang tidak melupakan dari mana dia berasal dengan menghormati dan memberikan pembuktian secara nyata lewat upacara nadran bagi para pendiri desa baregbeg di masa lalu.

KESIMPULAN

Pembangunan menjadi indikator bagi negara-negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun dilain sisi pembangunan sering kali menimbulkan dampak-dampak negatif yang berdampak pada jangka panjang dan kehidupan di dunia. Dengan berbagai permasalahan yang kompleks dan tantangan-tantangan yang muncul.

Oleh karena itu para pemimpin dunia berkomitmen untuk membuat kebijakan-kebijakan agenda pembangunan global yang dijadikan acuan dalam melakukan pembangunan nasional. sehingga tantangan-tantangan pembangunan disetiap negara dapat diselesaikan dan tujuan pembangunan global dapat dirasakan merata oleh negara-negara lainnya.

Pada tahun 2015 para pemimpin-pemimpin negara menyepakati komitmen agenda pembangunan global yang dikenal dengan sustainable development goals (SDGs). Dan SDGs ini diadaptasi menjadi lebih sederhana dengan nama SDGs Desa.

Adapun partisipasi SDGs Desa di Pemerintahan Desa Baregbeg dapat terlihat dari

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan terlihat bahwa

masyarakat Desa Baregbeg cukup tanggap dalam memahami permasalahan di desanya. Meskipun pada kenyataannya dalam setiap rapat musrembag lebih didominasi tokoh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan sumbangsih tenaga dan uang. namun pada kenyataannya tidak semua masyarakat mampu memberikan partisipasinya karena sepenuhnya biaya pembangunan diserahkan kepada pihak pemerintah.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat dilihat pada upaya pemeliharaan dan merawat hasil pembangunan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sebagai kesatuan yang memiliki tanggungjawab akan aset pembangunan desa.

Partisipasi dalam evaluasi dapat terlihat pada keterlibatan masyarakat dalam menilai hasil pembangunan. pemerintah desa melalui wadah rapat evaluasi hasil pembangunan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai ketercapaian program sebagai upaya mengatasi masalah. masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap kinerja pemerintah dalam merangkul program pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, R. N. (2021). Resensi: SDGs Desa, Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 24(1), 137-139.
- Hasjimzoem, Y. (2014). Dinamika Hukum Pemerintahan Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 463-476.
- Husain, N., Rohandi, M., Latief, M., Mulyanto, A., Bouty, A. A., & Kadim, A. A. (2022). Pendampingan masyarakat Desa Lakeya dalam Pencapaian SDGs

- Desa. *Devotion: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Bidang Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 1(2), 31-37.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438-444.
- Surya, R. Z. (2019). Analisa Keselarasan Sdgs Dengan Program Pembangunan Desa Seresam Di Desa Seresam Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 5(Nomor 2).
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10.